

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tahun Penilaian : 2024
Periode yang dinilai : Januari - Desember 2024
Tujuan Strategis :
Sasaran strategis OPD : Meningkatnya Populasi Ternak

Urusan Pemerintahan : Pilihan

No	Sasaran	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Meningkatnya Populasi Ternak	% Peningkatan Populasi Ternak	Menurunnya populasi ternak	RSO.01	Kepala Dinas	Terjadinya wabah penyakit hewan menular strategis (HPMS)	Eksternal	C	Menurunnya ketersediaan daging dan telur di masyarakat	Masyarakat
						Menurunnya minat masyarakat untuk melakukan usaha peternakan				
						Terjadinya penyakit non infeksius dan gangguan reproduksi				

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom f diisi dengan Kode risiko
Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*
Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan



SHOFIAH NURHAYATI, SP. MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720420 199602 2 001

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama OPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tahun Penilaian : 2024

Periode yang dinilai : Januari - Desember 2024

Tujuan Strategis :

Sasaran strategis OPD : 1. Meningkatnya Populasi Ternak

Urusan Pemerintahan : Pilihan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l
I	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase sarana peternakan dalam kondisi baik								
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Peternakan	Penggunaan Sarana Pertanian Belum Optimal	ROO.01	Kabid PPHP	Kurangnya komitmen petugas dalam melakukan pembinaan dan pendampingan dalam rangka pengawasan penggunaan sarana pertanian	Internal	C	Pemanfaatan sarana pertanian tidak optimal	Pemerintah, Peternak
						Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam penggunaan sarana pertanian	Eksternal			
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Nilai SC (Service per Conception)	Peternak tidak menggunakan teknologi untuk beternak	ROO.02	Kabid Budidaya	Kurangnya Pembinaan dan Fasilitasi	Internal	C	Penguasaan Teknologi oleh Peternak Rendah	Peternak
3	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Prosentase Kios Obat Hewan yang Diawasi dan Dievaluasi	Pengawasan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewat Belum Optimal	ROO.03	Kabid Keswan	Kurangnya Kapasitas Petugas	Internal	C	Obat Hewan yang Beredar Belum Terjamin Mutunya	Peternak
4	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Peningkatan Bibit Ternak yang Diawasi	Data dan Informasi tentang ternak dan hijauan pakan ternak (HPT) unggul tidak akurat	ROO.04	Kabid Budidaya	Kurangnya Pendekatan dan Pengawasan yang Intensif	Internal	C	Dokumen Informasi Ternak dan HPT Unggul yang Disusun Tidak Valid	Pemerintah/Masyarakat
5	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	% Luasan Tanam HPT	Bantuan Hibah Tidak Tepat Sasaran	ROO.05	Kabid Budidaya	Kurang Koordinasi yang baik dengan Pengusul Penerima Hibah	Internal	C	Bantuan Hibah Tidak Sesuai Kebutuhan	Peternak
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana Peternakan dalam Kondisi Baik								
1	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Tersedia	Tidak Adanya Prasarana Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	ROO.06	Kabid Budidaya/Kabid Kesmavet	Terbatasnya Anggaran	Internal	C	Jumlah Prasarana Pertanian yang Rusak Tidak Terpelihara	Peternak
III	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase ternak ruminansia yang terlayani								
		Prosentase ternak unggas yang terlayani								
		Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular								
		Prosentase peningkatan produk hewan yang ASUH								
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Ternak yang Ditangani	Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis Tidak Dapat Tertangani dan Terkendali dengan Baik.	ROO.07	Kabis Keswan	Petugas Pelaksana Kurang Kompeten, Kurang Koordinasi antar Instansi, Sarana dan Prasarana Kurang Memadai, Pelaksanaan Penanganan dan Pengendalian Penyakit Tidak Sesuai dengan SOP, Munculnya Penyakit Hewan yang Sebelumnya Tidak Ada.	Internal	C	Terjadi Penularan Penyakit Hewan dan Zoonosis.	Peternak
2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Hewan yang Diawasi	Masuknya Penyakit Hewan pada Hewan yang Dilalulintaskan	ROO.08	Kabid Keswan	Pelaku Usaha Tidak Memahami Persyaratan Lalu Lintas Hewan	Eksternal	C	Munculnya Penyakit Hewan Melalui penularan Hewan sakit	Peternak/Masyarakat
3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang Dilaksanakan	Kualitas Pelayanan Kurang Memadai	ROO.09	Kabid Keswan	Keterbatasan Jumlah Petugas dan Sarana Prasarana Kurang Memadai	Internal	C	Keluhan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Peternak/Masyarakat
4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Unit Usaha Produk Hewan yang Dibina dan Diawasi	Persyaratan Kelayakan Mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Tidak Terpenuhi	ROO.10	Kabid Kesmavet	Kurangnya Pembinaan dan Fasilitasi	Internal	C	Pengetahuan Pengusaha Produk Asal Hewan Ternak tentang Kelayakan Tempat Usaha Masih Kurang	Peternak

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l
5	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Prosentase Pendampingan Unit Kesejahteraan Hewan	Banyaknya Pemotongan Hewan Ternak yang Tidak Bisa Diawasi	ROO.11	Kabid Kesmavet	Terjadinya Pemotongan Hewan di Luar Rumah Potong Hewan (Pemerintah/Swasta)	Eksternal	C	Daging yang Beredar di Pasar Kurang Terjamin Keamanannya, Kesehatannya, Keutuhannya dan Kehalalannya (ASUH)	Masyarakat
IV	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase ternak betina peserta AUTSK								
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak Peserta AUTSK	Minat peternak mengikutsertakan ternaknya dalam program AUTS/K rendah	ROO.12	Kabid PPHP	Kesadaran peternak terhadap perlindungan usaha kurang	Eksternal dan Internal	C	Jumlah peserta AUTS/K menurun	Peternak
						Kurangnya informasi kepada peternak			Tidak ada jaminan perlindungan terhadap resiko usaha peternak	
V	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase Peningkatan legalitas usaha peternakan								
1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Budidaya yang Terdata	- Petugas kurang maksimal dalam melakukan pendataan usaha budidaya ternak skala mikro dan sosialisasi perijinan - Peternak kurang memahami aturan perijinan usaha peternakan	ROO.13	Kabid PPHP	Kurangnya pengetahuan petugas dan peternak tentang perijinan usaha peternakan	Internal, eksternal	C	Masih banyak usaha peternakan yang belum memenuhi perijinan sebagaimana ketentuan peraturan yang ada	Peternak, pemerintah
						- Kurangnya informasi terkait perijinan usaha peternakan pada peternak				
2	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Rekomendasi yang Diterbitkan	Tidak Terpenuhinya Persyaratan Teknis dan Administrasi Permohonan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	ROO.14	Kabid Keswan	Kurangnya Informasi yang Disampaikan Kepada Pelaku Usaha tentang Persyaratan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan, kesadaran masih rendah dari pelaku usaha	Internal dan Eksternal	C	Adanya Peredaran Obat Hewan yang Seharusnya Tidak Dipasarkan/Dijual dan Obat Hewan Ilegal oleh Pengecer Obat Hewan	Peternak
VI	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase peningkatan kemampuan kelas kelompok								
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Ternak yang Meningkatkan Kelasnya	Pembinaan Kelompok Kurang maksimal	ROO.15	Kabid PPHP	- Jumlah SDM penyuluh terbatas/kurang - Adanya kelompok yang terbentuk dengan motivasi awal mendapat bantuan	Eksternal, internal	C	kelompok ternak banyak yang tidak berkembang	Peternak, pemerintah

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi



Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan

SHOFIAH NURHAYATI, SP. MSI.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720420 199602 2 001

Formulir Kertas Kerja
Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tahun Penilaian : 2024
Periode yang dinilai : Januari - Desember 2024
Tujuan Strategis :
Sasaran strategis OPD : Meningkatnya Populasi Ternak

Urusan Pemerintahan : Pilihan

No.	Sasaran	Pernyataan Resiko	Penyebab	Dampak	Terkontrol/Tidak Terkontrol	Nilai Risiko				Pengendalian yang Ada	Celah Pengendalian	Pengendalian yang Dibutuhkan	Pemilik Risiko
						Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Total	Tingkat Risiko				
I													
1	Meningkatnya Populasi Ternak	Menurunnya Populasi Ternak	Terjadinya wabah penyakit hewan menular dan zoonosis	Menurunnya Ketersediaan Daging dan telur di Masyarakat	C	2	4	8	Sedang	Pelaksanaan Vaksinasi dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan	Munculnya wabah penyakit hewan menular yang sebelumnya belum	Monitoring dan Surveilans Penyakit Hewan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Kepala Dinas
			Menurunnya minat masyarakat untuk melakukan usaha peternakan			2	2	4	Rendah	Mengefektifkan sekolah peternakan rakyat	Peserta pelatihan belum menularkan hasil pelatihan kepada anggota kelompok yang lain	Pendampingan dan monev hasil pelatihan	
			Terjadinya penyakit non infeksius dan gangguan reproduksi			3	4	12	Sedang	Peningkatan kapasitas SDM Petugas dan Peternak	Komunikasi antara petugas dan peternak belum optimal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan



SHOFIAH NURHAYATI, SP. MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720420 199602 2 001

Formulir Kertas Kerja
Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tahun Penilaian : 2024
Periode yang dinilai : Januari - Desember 2024
Tujuan Strategis :
Sasaran strategis OPD : Meningkatnya Populasi Ternak

Urusan Pemerintahan : Pilihan

No.	Program/Kegiatan	Pernyataan Resiko	Penyebab	Dampak	Terkontrol/Tidak Terkontrol	Nilai Risiko				Pengendalian yang Ada	Celah Pengendalian	Pengendalian yang Dibutuhkan	Pemilik Risiko
						Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Total	Tingkat Risiko				
I	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Penggunaan sarana pertanian kurang optimal	Kurangnya komitmen petugas dalam melakukan pembinaan dan pendampingan penggunaan sarana pertanian	Pemanfaatan sarana pertanian tidak optimal	C	2	2	4	Rendah	Pembinaan dan Pendampingan Peternak	Respon peternak rendah	Pembinaan dan penyuluhan lebih intens	Kabid PPHP
			Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam penggunaan sarana yang ada										
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Peternak tidak menggunakan teknologi untuk beternak	Kurangnya pembinaan dan fasilitasi	Penguasaan teknologi oleh peternak rendah	C	1	2	2	Rendah	Sosialisasi Teknologi Kepada Para Peternak	Respon Peternak Masih Rendah	Sosialisasi, Pembinaan dan Fasilitasi Lebih Intens	Kabid Budidaya
3	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Pengawasan mutu, khasiat dan keamanan obat hawat belum optimal	Kurangnya kapasitas Petugas	Obat hewan yang beredar belum terjamin mutunya	C	1	2	2	Rendah	Peningkatan Kapasitas Petugas	Koordinasi dengan Intansi Terkait Perlu Ditingkatkan	Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Terkait	Kabid Keswan
4	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Data dan Informasi tentang ternak dan hijauan pakan ternak (HPT) unggul tidak akurat	Kurangnya pendekatan dan pengawasan yang intensif	Dokumen informasi ternak dan HPT unggul yang disusun tidak valid	C	1	2	2	Rendah	Validasi Data dan Informasi Tentang Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (HPT) Unggul	Masih Terdapat Data Yang Kurang Valid	Pendekatan dan Pengawasan Lebih Intensif	Kabid Budidaya
5	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Bantuan Hibah tidak tepat sasaran	Kurang koordinasi yang baik dengan pengusul penerima hibah	Bantuan Hibah tidak sesuai kebutuhan	C	1	2	2	Rendah	Koordinasi dengan Pengusul Penerima Bantuan	Tidak Dilakukan Melalui SOP Yang Benar	Koordinasi Yang Baik dengan Pengusul Penerima Bantuan dan Dilakukan Melalui SOP yang Benar	Kabid Budidaya
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN												
1	Pembangunan Prasarana Pertanian	Tidak adanya prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Terbatasnya anggaran	Jumlah prasarana pertanian yang rusak tidak terpelihara	C	3	1	3	Rendah	Memanfaatkan Prasarana yang Ada	Prasarana yang Ada Perlu Dimaksimalkan	Memaksimalkan Penggunaan Prasarana yang Ada	Kabid Budidaya/Kabid Kesmavet
III	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER												
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis tidak dapat tertangani dan terkendali dengan baik.	Petugas pelaksana kurang kompeten, kurang koordinasi antar instansi, sarana dan prasarana kurang memadai, pelaksanaan penanganan dan pengendalian penyakit tidak sesuai dengan SOP, munculnya penyakit hewan yang sebelumnya tidak ada.	Terjadi penularan penyakit hewan dan zoonosis.	C	2	2	4	Rendah	Peningkatan Kompetensi Petugas, Koordinas Antar Instansi, Penyediaan Sarana Prasarana, Pelaksanaan Sesuai SOP, Monitorng/Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan.	Ada Kasus/Penyakit Baru Yang Sebelumnya Belum Ada dan Lalu Lintas Hewan Ternak Tinggi.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Kabid Keswan
2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Masuknya penyakit hewan pada hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan	Pelaku usaha tidak memahami persyaratan lalu lintas hewan dan produk hewan	Munculnya penyakit hewan melalui hewan dan produk hewan	C	1	1	1	Sangat Rendah	Koordinasi Antar Instansi	Koordinasi Antar Intansi dan KIE Perlu Ditingkatkan	Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE)	Kabid Keswan

No.	Program/Kegiatan	Pernyataan Resiko	Penyebab	Dampak	Terkontrol/Tidak Terkontrol	Nilai Risiko				Pengendalian yang Ada	Celah Pengendalian	Pengendalian yang Dibutuhkan	Pemilik Risiko
						Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Total	Tingkat Risiko				
3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kualitas Pelayanan kurang memadai	Petugas kurang kompeten dan sarana prasarana kurang memadai	Keluhan masyarakat atas layanan pemerintah	C	2	2	4	Rendah	Meningkatkan Kompetensi Petugas dan Penyediaan Sarana Prasarana Sesuai Kebutuhan	Manajemen Pelayanan Masih Perlu Perbaikan	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Kabid Keswan
4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persyaratan kelayakan mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) tidak terpenuhi	Kurangnya pembinaan dan fasilitasi	Pengetahuan pengusaha produk asal hewan ternak tentang kelayakan tempat usaha masih kurang	C	2	2	4	Rendah	Sosialisasi Kepada Para Pelaku Usaha	Kesadaran Pelaku Usaha Masih Kurang	Sosialisasi Lebih Intens	Kabid Kesmavet
5	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Banyaknya pemotongan hewan ternak yang tidak bisa diawasi	Terjadinya pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan (Pemerintah/Swasta)	Daging yang beredar di Pasar kurang terjamin keamanannya, kesehatannya, keutuhannya dan kehalalannya (ASUH)	C	4	3	12	Sedang	Sosialisasi Kepada Para Pelaku Usaha	Kesadaran Pelaku Usaha Masih Kurang	Sosialisasi Lebih Intens	Kabid Kesmavet
IV	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN												
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Minat peternak mengikutsertakan ternaknya dalam program AUTS/K rendah	Tidak semua penyakit bisa ditanggung asuransi Kesadaran peternak terhadap perlindungan usaha kurang Kurangnya informasi kepada peternak	Jumlah peserta AUTS/K menurun Kerugian usaha peternakan menurun tidak ada jaminan perlindungan terhadap resiko usaha peternak	C	3	2	6	Sedang	Sosialisasi program AUTS/K kepada peternak	Peserta sosialisasi terbatas	Sosialisasi lebeih intensif	Kabid PPHP
V	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN												
1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Petugas kurang maksimal dalam melakukan pendataan usaha budidaya ternak skala mikro dan sosialisasi perijinan	Kurangnya pengetahuan petugas dan peternak tentang perijinan usaha peternakan	Masih banyak usaha peternakan yang belum memenuhi perijinan sebagaimana ketentuan peraturan yang ada	C	4	2	8	Sedang	Sosialisasi tentang perijinan usaha peternakan pada petugas dan peternak	Kesadaran peternak tentang perijinan usaha peternakan kurang	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha peternakan lebih intens	Kabid PPHP
		Peternak kurang memahami aturan perijinan usaha peternakan	Kurangnya informasi terkait perijinan usaha peternakan pada peternak										
2	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Tidak terpenuhinya persyaratan teknis dan administrasi permohonan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Kurangnya informasi yang disampaikan kepada pelaku usaha tentang persyaratan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Adanya peredaran obat hewan yang seharusnya tidak dipasarkan/dijual dan obat hewan ilegal oleh pengecer obat hewan	C	1	2	2	Rendah	Sosialisasi Lewat Media Sosial	Belum Semua Masyarakat Memahami	Sosialisasi Lebih Intens	Kabid Keswan
VI	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan jumlah kelompok peternak yang dibina tidak tercapai											
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembinaan Kelompok Kurang maksimal	Kumlah SDM penyuluh terbatas/kurang Adanya kelompok yang terbentuk dengan motivasi awal mendapat bantuan	Kelompok ternak banyak yang tidak berkembang	C	2	2	4	Rendah	Peningkatan SDM penyuluh	Jumlah penyuluh terbatas	Penyuluhan dengan melibatkan petugas/pejabat fungsional lainnya yang ada di wilayahnya	Kabid PPHP
	JUMLAH												

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan



SHOFIAH NURHAYATI, SP. MSI.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720420 199602 2 001